



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN TAKALAR**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alahmdulillan kehadiran Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelesaikan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar tahun 2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategi (REnstra) tahun 2025-2030 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan REncana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Kerja Tahun 2026, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Juli 2025

Kepala Dinas



**SYAINAL MANNAN S.STP, M.Si**

NIP. 19770505 199711 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMINFO TAHUN 2024.....	8
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Kominfo.....	8
2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo .....	17
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	37
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah .....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Tahun 2026.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	59
4.1 Program kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah .....	44
4.1.1 Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional.....	44
4.1.2 Dukungan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
4.1.3 Prioritas pembangunan daerah .....	46
4.2 Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan renja .....	47
BAB V PENUTUP .....	67
5.1 Catatan penting.....	67
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja s/d Tahun 2025 .....	9
Tabel II.2 Rekapitulasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan .....	16
Tabel II.3 Pencapaian kinerja pelayanan .....	18
Tabel II.4 Indikator kinerja kunci .....	23
Tabel II.5 Pencapaian kinerja sustainable development goal (SDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).....	25
Tabel II.6 Review terhadap rancangan awal RKPD 2026.....	29
Tabel III.1 17 Program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat .....	38
Tabel III.2 Tujuan, sasaran serta target indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2025-2030.....	41
Tabel III.3 Tujuan, sasaran serta target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025-2030.....	43
Tabel IV.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan .....	45
Tabel IV.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan .....	45
Tabel IV.3 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah.	46
Tabel IV.4 Rumusan rencana progra dan kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan maju tahun 2027 ....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan renja tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya .....	2
----------------------------------------------------------------------------------	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

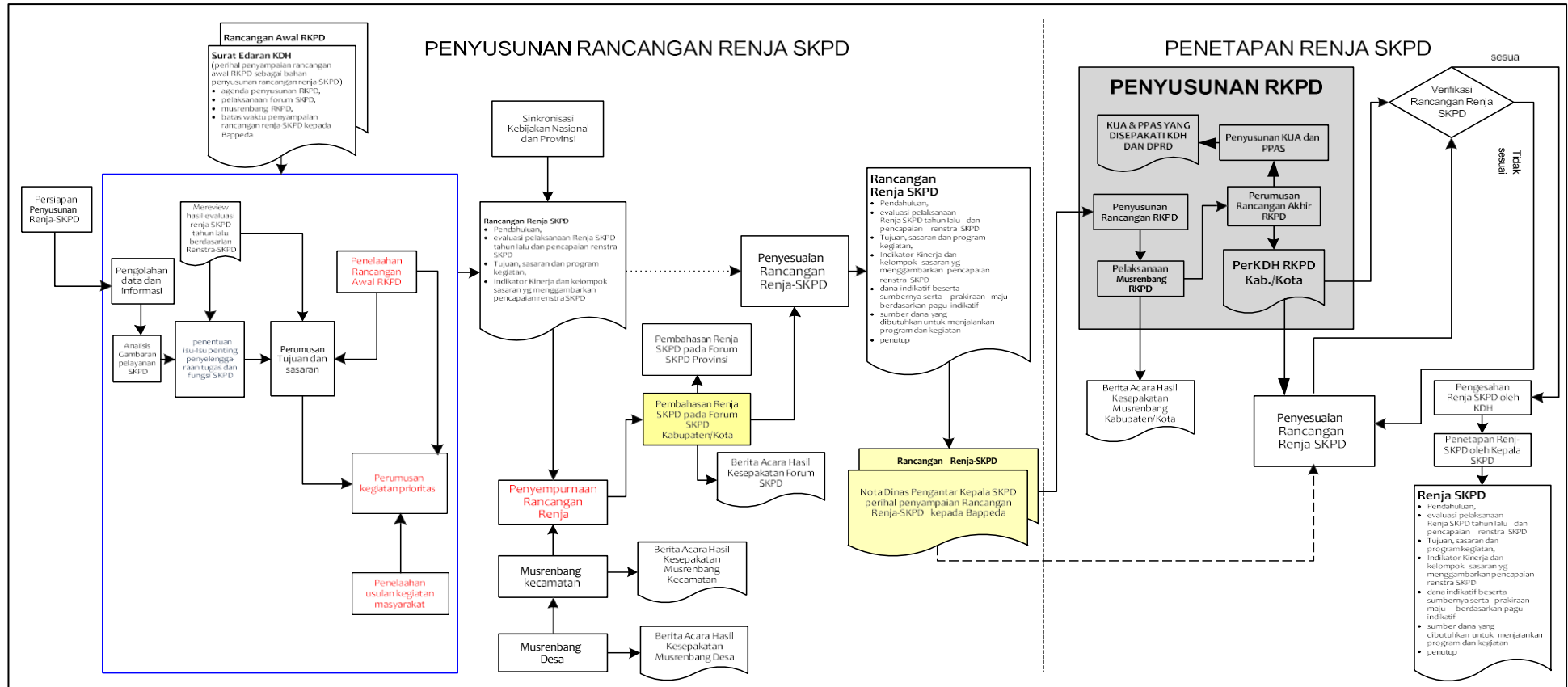
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;
2. Kesesuaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
6. Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
7. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
8. Isu-isu strategis yang berkembang;
9. Kebijakan Nasional;
10. Regulasi yang berlaku.

Gambar I-1

Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber :

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026;
3. Melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebelum diajukan untuk dilakukan verifikasi oleh Bappelitbangda;
6. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026;
7. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
8. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
9. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026;

10. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;

3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Bappelitbangda sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Teknologi Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2580 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
  12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 28);
  13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 15)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Takalar Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

**BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.** Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2024, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

**BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar.** Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar.**

**BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026.** Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027.

**BAB V Penutup.** Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 2026.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacupada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	01													
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01	01												
5	01	01												
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	100%	94,21%	100%	99%	99,46%	100%	23,08%	23,08%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	30,77%	30,77%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja)	8	2	8	2	100%	2	6	50,00%
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	1	4	1	100%	1	3	50,00%
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-DPA SKPD	4		4	1	100%	1	2	25,00%
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4		4	1	100%	1	2	25,00%
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	4		4	1	100%	1	2	25,00%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	4	4	100%	4	8	125,00%
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100%	90%	100%	93,83%	93,83%	100%	38,3%	38,3%
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	1624	504	1624	406	100%	406	812	56,03%
						Jumlah orang yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai	1392	360	1394	348	100%	348	696	50,86%
5	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4		4	1	0%	4	5	28750,00%

5	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	4	1	0%	0	2	0,00%
5	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4		1	1	100%	1	2	50,00%
5	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	27,08%	27,08%
5	1	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4		4	1	100%	1	2	25,00%
5	1	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4		4	1	100%	1	2	25,00%
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100		100	75	75%	75	35,29	35,29
5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	8		8	2	100%	2	4	25%
5	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140		140	15	100%	15	30	11%
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	98	100	87	87	100	27,33	27,33
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	12		12	3	100%	3	6	25%
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	12	3	12	3	100%	3	9	50%
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	12	2	12	3	100%	3	8	42%
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	50	200	50	100%	50	150	50%
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	94,44	94%	100	34,49	34%
5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi	12	3	12	2	78%	12	17	125%
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa non PNS	4	1	4	0	0%	4	5	125%

2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4		4	12	100%	4	16	100%
2	16	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%							
2	16	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	40		40	2	100%	2	4	5%
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah		83	100	64,86	64,86	100	3,57	3,57
5	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	5	24	6	100%	12	23	71%
2	16	2			<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>67,95</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>36,31</b>	<b>36,31</b>
2	16	2	02.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik	100,00%	100	100	100	100%	100	42,12	42,12
2	16	2	02.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	8	2				0	2	25%
2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8	2	8	2	100%	2	6	50%
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	4	1	4	1	100%	1	3	50%
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya kapasitas sumber daya komunikasi publik	120	30				0	30	25%
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	8	2	8	2	100%	2	6	50%
2	16	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,98%</b>	<b>100%</b>	<b>19,14%</b>	<b>19,14%</b>
2	16	3	02.02		Pengelolaan E Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase tata kelola e-government	100%	100 %	100%	100%	99,98%	100%	27,81%	27,81%
2	16	3	02.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	1	4	1	100%	1	3	50%
2	16	3	02.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	4		4	1	100%	1	2	25%

2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4	1	4	1	100%	1	3	50%	
2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	4	1	4	1	99,90%	1	3	50%	
2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	4		4	1	100%	1	2	25%	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2	20	2			<b>Program Penyelenggaraan Statistik sektoral</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>66,67</b>			<b>100%</b>				
2	20	2	02.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terselenggaranya statistik sektoral	100%	66,67			100%				
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	4	1	4	1	100%	1	3	50%	
2	20	2	02.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	200	50	200	50	100%	50	150	50%	
2	20	2	02.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral	4	1	4	1	100%	1	3	50%	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	2			<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Tingkat keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	21	2	02.01		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengamanan informasi pemerintah	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	21	2	02.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	4	1	4	1	100%	1	3	50%	
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	35	10	35	10	100%	10	30	57%	

Sumber data: Monev Tw IV tahun 2023 dan 2024, Monev Tw I tahun 2025

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan penyusunan Renja tahun 2026 yaitu:

- 1) Melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya tentang program/kegiatan mana yang tidak tercapai target kinerjanya, telah tercapai dan yang melampaui target kinerja sehingga bisa dipetakan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan dengan Program-program periotaspembangunan sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kab. Takalar untuk kepentingan penganggaran.
- 2) Melakukan Prediksi capaian kinerja di tahun berjalan yaitu 2025 untuk mengukur analisa kebutuhan kinerja tahun berikutnya sehingga prediksi anggaran di tahun 2026 tidak menyimpang dari target perencanaan di tahun kelima Renstra Dinas.
- 3) Melakukan penataan sasaran-sasaran strategis didalam kerangka tujuan strategis untuk tahun selanjutnya, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi & Informatika melalui kegiatan diklat, pendidikan dan pelatihan formal.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa Komunikasi berupa pengembangan jaringan
- 6) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pemberitaan/informasi publik dengan mengoptimalkan pengelolaan media center dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Public Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)

## ***Evaluasi & Analisa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024***

### **1. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Indikator program ini adalah Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan dengan capaian kinerja 82,52%, hal ini disebabkan karena ada 3 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi 100 % yaitu:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 86%
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian 98%
- b. Program Aplikasi Informatika Publik = 99,98%, hal ini disebabkan karena ada 1 sub kegiatan yang belum bisa terealisasi 100 % yaitu:
  - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas = 99,90 %

### **2. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja**

Terdapat 2 program yaitu:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik =100%
- b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral = 100%
- c. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi = 100%

### **3. Faktor pendukung tercapai kinerja Program diatas :**

Faktor pendukung tercapai kinerja Program diatas

1. Adanya tuntutan untuk jaringan komunikasi yang terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar;
2. Adanya keseriusan oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya;Adanya dukungan pendanaan untuk memenuhi/menyiapkan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika;
3. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas karena terbatasnya SDM yang menguasai IT.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program di atas antara lain:

1. Kurangnya peralatan pendukung alat telekomunikasi di Kabupaten Takalar untuk mewujudkan percepatan smart city;
2. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas karena terbatasnya SDM yang menguasai IT;
3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses terkait aplikasi penyebaran informasi media komunikasi publik;
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pemenuhan metadata statistik Kab. Takalar;
5. Sarana dan prasarana belum tersedia untuk pemenuhan 5 aspek keamanan informasi.

#### **4. Implikasi**

1. Menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan,
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahun berikutnya

#### **5. Tindak Lanjut**

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi
  - a. Dokumentasikan capaian vs target program/kegiatan secara lengkap (output, outcome, realisasi anggaran, hambatan).
  - b. Identifikasi program/kegiatan yang tidak mencapai target, dengan alasan jelas (SDM, anggaran, regulasi, infrastruktur).
2. **Penetapan Aksi Korektif**
  - a. Untuk setiap program/kegiatan yang bermasalah, tentukan langkah perbaikan, siapa penanggungjawab, dan tenggat waktunya.
  - b. Contoh: Pelatihan SDM TIK untuk pegawai Dinas → jadwalkan bimtek dan alokasi anggaran 2025.
  - c. Perkuat koordinasi antar-perangkat daerah agar sistem informasi terintegrasi.
3. **Penyesuaian Renja & Anggaran**
  - a. Sinkronkan Renja dengan dokumen hasil evaluasi: alihkan anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas ke yang berdampak lebih tinggi.
  - b. Pastikan program baru atau kegiatan yang direvisi juga masuk dalam RKA-SKPD.
  - c. Sesuaikan indikator kinerja (IKU/IKP) agar lebih realistis namun tetap ambisius.
4. **Penguatan Monitoring & Evaluasi (M&E)**
  - a. Tentukan frekuensi monitoring pencapaian (misalnya triwulan) dan laporkan ke pimpinan.
  - b. Gunakan aplikasi atau dashboard untuk data real-time capaian kinerja.
  - c. Tetapkan mekanisme review setiap triwulan: bila ada deviasi besar → lakukan tindakan cepat.
5. **Penguatan Tata Kelola Data dan Integrasi Sistem**
  - a. Menindaklanjuti isu sistem yang berjalan terpisah: buat roadmap integrasi sistem informasi antar OPD.
  - b. Terapkan prinsip “Satu Data Indonesia”: standar data, interoperabilitas, dan akses terbuka.
  - c. Fokus pada keamanan informasi dan persandian (jika dalam lingkup tugas Dinas).
6. **Pengembangan SDM dan Kapasitas Internal**
  - a. Identifikasi kompetensi yang masih lemah (misalnya big data analytics, keamanan siber, pengelolaan proyek digital).
  - b. Rancang program pelatihan atau kerja sama dengan institusi pendidikan/komunitas IT.
  - c. Sertakan indikator keberhasilan pelatihan dalam Renja 2025.
7. **Keterlibatan Publik dan Transparansi**
  - a. Dari analisa mungkin ditemukan bahwa publikasi hasil program atau layanan digital belum maksimal.



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:



9	Indeks reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	B	
10	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	B	

Pada tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Indeks SPBE dengan *baseline* 2,80 (predikat Baik) mencerminkan landasan digitalisasi yang sudah kuat. Tantangan dan target di tahun 2024 adalah mendorong nilai ini naik, idealnya menuju predikat "Sangat Baik" (di atas 3,5). Kenaikan ini harus dicapai melalui langkah-langkah konkret, yaitu konsolidasi aplikasi/sistem (menghentikan pembuatan aplikasi baru yang tidak terintegrasi) dan penguatan Keamanan SPBE sebagai prasyarat utama transformasi digital.

Untuk indikator Persentase Penerapan e-Government yang Terintegrasi menunjukkan Realisasi 51% menunjukkan bahwa fondasi digital sudah terbentuk, namun sistem masih bekerja secara parsial. Target 80% adalah titik ideal di mana seluruh layanan utama sudah saling terhubung (interoperabilitas) sehingga masyarakat tidak perlu menyerahkan dokumen yang sama berulang kali ke instansi yang berbeda. Untuk mencapai 80%, fokus utama harus dialihkan dari "membuat aplikasi baru" menjadi "menghubungkan aplikasi yang sudah ada" melalui penguatan arsitektur SPBE

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang secara aktif mengelola informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah masyarakat Untuk indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan. Pada tahun 2024, jumlah KIM yang terbentuk sebanyak 2 kelompok, kemudian untuk meningkatkan kapasitas KIM, di tahun 2025 dilakukan kegiatan pengembangan di tingkat kecamatan dalam bentuk bimbingan teknis dengan target bertambahnya jumlah KIM.

Untuk indikator Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab. Takalar mencapai 60:40 dibawah target yang telah ditetapkan 80:20 capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu isu-isu strategis dan kontroversial, penyampaian informasi dan humas yang belum optimal, pengaruh media sosial dan berita tidak terverifikasi, dan keterbatasan pengelolaan krisis dan respon cepat.

Capaian indikator Persentase Penyediaan Data Statistik Sektorial sebesar 80% menunjukkan bahwa dari total 8.765 elemen data yang seharusnya disajikan, sebanyak 7.012 elemen data telah tersedia, sementara 1.753 elemen data belum dapat disajikan. Capaian ini masih berada di bawah target 100%, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengelola data, belum optimalnya standarisasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah, tantangan teknis dan infrastruktur pendukung, serta proses validasi dan verifikasi data yang memerlukan waktu relatif lama.

Untuk indikator ketersediaan metadata, Kabupaten Takalar telah memiliki metadata statistik sektorial yang tersedia dan terdokumentasi. Metadata tersebut memuat informasi penting terkait definisi data, konsep, variabel, satuan, metode pengumpulan, sumber data, serta periode waktu, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam memahami dan menggunakan data secara tepat. Ketersediaan metadata ini mendukung peningkatan kualitas data, keterpaduan antar OPD, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan data di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pengamanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, nilai tingkat pengamanan informasi diperoleh dari hasil evaluasi internal dan konfirmasi melalui instrumen penilaian pengamanan informasi yang diterapkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Adapun upaya pengamanan informasi yang telah dilakukan meliputi pengamanan dasar sistem informasi, pengelolaan hak akses pengguna, penggunaan kata sandi pada perangkat dan aplikasi, serta penerapan pembatasan akses data dan informasi sesuai kewenangan. Namun, pengamanan yang dilakukan masih bersifat dasar dan belum diterapkan secara menyeluruh pada seluruh sistem dan perangkat daerah. Capaian tingkat pengamanan informasi saat ini baru mencapai 20%, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 50%. Rendahnya capaian ini

disebabkan oleh belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi secara komprehensif, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi, serta belum tersusunnya kebijakan dan standar operasional prosedur pengamanan informasi yang lengkap dan terintegrasi. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan standar pengamanan informasi yang lebih terstruktur dan terukur guna meningkatkan tingkat pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sebagai jaring keamanan dalam komunikasi dan perlindungan data hanya mencapai 2,63% dari target sebesar 57,14%, karena dari 38 perangkat daerah yang ada, hanya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah menerapkan mekanisme pengamanan informasi melalui sistem persandian secara memadai. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan mekanisme pengamanan informasi adalah Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah tentang Urgensi Penggunaan Sandi, Ketiadaan Regulasi Internal yang Mengikat, Terbatasnya Sosialisasi dan Pendampingan Teknis, Keterbatasan SDM dan Infrastruktur, dan Keterlambatan dalam Implementasi Program Pengamanan Informasi Terpusat.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sampai TW 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Indeks SPBE/Indeks PEMDI (Pemerintah Digital) pada tahun 2025 ditetapkan target 2.90 dan realisasi kinerja pada Tw 2 tahun 2025 yaitu 2.80 Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah telah berjalan dengan baik dan terus mengalami kemajuan, terutama dalam aspek kebijakan internal SPBE, pengelolaan layanan digital, dan keamanan informasi.
2. Indeks Keterbukaan Informasi publik pada tahun 2025 ditetapkan target 50 dan realisasi kinerja pada Tw 2 tahun 2025 yaitu belum dinilai disebabkan oleh belum dilaksanakannya kegiatan pengukuran atau penilaian IKIP secara forma, baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh komisi informasi Selain itu, belum optimalnya pengelolaan sistem informasi publik, keterbatasan sumber daya manusia PPID, serta belum tersedianya data pendukung menjadi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target tersebut
3. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian pada tahun 2025 ditetapkan target 75 namun realisasi kinerja sampai TW 2 Tahun 2025 yaitu belum di nilai karena survei kepuasa masyarakat belum dilaksanakan pada periode ini.
4. Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 ditetapkan target 2.60 dan realisasi kinerja pada Tw 2 tahun 2025 yaitu 2.11 nilai ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik di pemerintah daerah masih berada pada tahap “Berkembang”, dengan beberapa capaian positif terutama pada aspek koordinasi kelembagaan statistik dan ketersediaan metadata statistik sektoral.
5. Indeks keamanan informasi (Indeks KAMI) pada tahun 2025 ditetapkan target 70% dan realisasi kinerja pada Tw 2 tahun 2025 belum tersedia dikarenakan proses pengukuran dan penilaian keamanan informasi belum dilaksanakan secara formal oleh instansi yang berwenang atau masih dalam tahap persiapan internal.
6. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Target yang ditetapkan adalah memperoleh nilai 75,00 Pada Triwulan 2 tahun 2025, penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum dilaksanakan sehingga belum terdapat data realisasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian perlu mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan

evaluasi kinerja agar saat penilaian dilakukan hasilnya dapat sesuai target.

7. Tingkat Literasi Digital ASN pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, dan realisasi pada triwulan 2 juga telah mencapai 83,33 %, sehingga capaian ini memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 24 ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mampu memahami literasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Namun, peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

**Tabel II.4**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	0%	20%	30%	50%	0	0	0	21.05	73.68
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	70	78.26	73.08	71.43	71.43
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	71%	74%	77%	80%	83%	71%	74%	80%	85%	86%
4	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembanguna daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40%	60%	65%	70%	75%	26%	30%	34%	35%	48%

Indikator Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2020 sampai 2023 sebesar 0% belum ada terlayani akses internet, tahun 2024 sebesar 21,05% hanya 8 OPD yang terlayani akses internet dan pada tahun 2025 sebesar 73,68% ada 28 OPD yang terlayani akses internet dari Dinas Kominfo.

Indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi jumlah layanan publik pada tahun 2024 sebesar 71,43% dimana dari 28 layanan publik yang ada kabupaten takalar terdapat 20 jenis layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Kurangnya SDM dan Infrastruktur TI yang menjadi penyebab terhambatnya pelayanan publik percepatan transformasi digital yang menjadi salah satu program unggulan daerah diharapkan mampu menjadi solusi terhadap masalah tersebut.

Indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota pada tahun 2024 sebesar 87% hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten takalar dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Indikator Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembanguana daerah sudah mencapai realisasi 100% ini di sebabkan ketersediaan dan akses data yang baik, dukungan sistem dan SDM, serta komitmen pimpinan sehingga seluruh OPD menerapkan perencanaan pembangunan daerah berbasis data statistik.

Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2024 sebesar 48%. Capaian ini tidak memenuhi target menjadi sinyal bahwa ancaman siber belum sepenuhnya dapat dimitigasi dengan infrastruktur yang ada saat ini. Pemerintah Kabupaten Takalar perlu segera melakukan akselerasi pada pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara formal, melakukan pemeriksaan kerentanan sistem secara rutin, dan meningkatkan literasi keamanan siber bagi seluruh aparatur pemerintah agar tidak menjadi titik lemah (*weak link*) dalam pertahanan informasi.

**Tabel II. 5**  
**Pencapaian Kinerja Sustainable Development Goal (SDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar**

Kode Indikator	INDIKATOR	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan										
5.b	Sasaran 5.b : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60,68%	63,36%	N/A	72,88%
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
9.2	Sasaran 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	63%	64%	65%	67%	72%	60%	61%	63%	65%	69,99%
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										

17.6	Sasaran 17.6: Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalabar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	63%	64%	65%	67%	72%	60%	61%	63%	65%	69,99%
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%
17.8	Sasaran 17.8: Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.8.1	Persentase pengguna internet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60,68%	63,36%	N/A	72,88%

Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada tahun 2024, dimana dari 306.338 jiwa penduduk usia di atas 5 tahun di Kabupaten Takalar, sebanyak 223.264 jiwa penduduk yang telah menguasai telepon seluler atau sebesar 72,88% . Capaian ini masih bawah target kepemilikan telepon genggam disebabkan oleh faktor ekonomi, infrastruktur, dan literasi digital. Solusi yang tepat adalah kombinasi antara peningkatan akses perangkat dan jaringan, edukasi masyarakat, serta kebijakan yang mendukung inklusi digital.

Akses bergerak pitalebar (mobile broadband) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak. Capaian Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband pada tahun 2024 sebesar 69,99%, dimana dari 306.338 jiwa penduduk di kabupaten takalar sebanyak 233.004 jiwa yang terlayani broadband. Capaian ini menunjukkan masih ada hambatan teknis, ekonomi, dan sosial dalam penyediaan layanan mobile broadband. Untuk meningkatkan proporsi layanan, diperlukan kombinasi perluasan infrastruktur, penurunan biaya akses, peningkatan literasi digital, dan ketersediaan perangkat bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga pada tahun 2024 mencapai 69,99%, dimana dari 66.573 unit rumah tangga yang ada di Kabupaten Takalar, sebanyak 46.601 rumah tangga yang terlayani jaringan internet. Capaian ini menunjukkan masih terdapat hambatan teknis, geografis, dan ekonomi dalam penyediaan layanan fixed broadband. Untuk meningkatkan proporsi pelanggan, perlu dilakukan perluasan infrastruktur, penurunan biaya layanan, peningkatan literasi digital, dan pemerataan investasi operator agar wilayah non-perkotaan dapat terlayani secara optimal

Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) pada tahun 2024 sebesar 90%, dimana dari 10 kecamatan yang ada. masih ada 1 kecamatan belum terjangkau infrastruktur jaringan serat optic yaitu Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Persentase pengguna internet pada tahun 2024 mencapai 72,88%, dimana dari 306.338 jiwa penduduk di Kabupaten Takalar, sebanyak 223.264 jiwa telah menggunakan internet. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor teknis, ekonomi, literasi, dan sosial budaya. Solusinya meliputi perluasan jaringan, subsidi akses, peningkatan literasi digital, dan penyediaan layanan/ konten relevan agar masyarakat terdorong untuk menggunakan internet.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Kurangnya peralatan pendukung alat telekomunikasi di Kabupaten Takalar untuk mewujudkan percepatan smart city;
2. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas karena terbatasnya SDM yang menguasai IT;
3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses terkait aplikasi penyebaran informasi media komunikasi publik;
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pemenuhan metadata statistik Kab. Takalar;
5. Sarana dan prasarana belum tersedia untuk pemenuhan 5 aspek keamanan informasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II-6

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Takalar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	100%	3,638,246,729	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Pattalassang	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	100%	3,638,246,729	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	25,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pattalassang	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	25,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA -SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA -SKPD	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pattallassang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pattallassang</b>	<b>Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>3,456,717,900</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pattallassang</b>	<b>Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>3,456,717,900</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	3,444,717,900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	3,444,717,900	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pattallassang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan Pattallassang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4,000,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pattallassang</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>6,000,000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,000,000	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pattallassang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,000,000	
--	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,500,000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	500,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase Administrasi Umum yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>37,428,829</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pattalassang</b>	<b>Persentase Administrasi Umum yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>37,428,829</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	697,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	697,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3,131,329	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3,131,329	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pattalassang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30,600,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pattalassang</b>	<b>Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>84,600,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pattallassang</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>84,600,000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pattallassang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pattallassang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33,600,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>26,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>26,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	26,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	26,000,000	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>Kel. Kalabibirang,</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo</b>	<b>25%</b>	<b>880,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>Kel. Kalabibirang,</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo</b>	<b>25%</b>	<b>880,000,000</b>	

	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Kec. Pattalassan g</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah</b>			<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Kec. Pattalassan g</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah</b>			
--	----------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik</b>	25%	880,000,000	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo</b>	25%	880,000,000	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	850,000,000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	850,000,000	
	Pelayanan Informasi Publik	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	12,500,000	Pelayanan Informasi Publik	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	12,500,000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	17,500,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	17,500,000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi</b>	25%	930,100,000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi</b>	25%	930,100,000	
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase tata kelola sub domain di lingkup pemerintah daerah</b>	25%	10,000,000	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase tata kelola sub domain di lingkup pemerintah daerah</b>	25%	10,000,000	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	10,000,000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	10,000,000	
	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase tata kelola e-government</b>	25%	920,100,000	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang</b>	<b>Persentase tata kelola e-government</b>	25%	920,100,000	

	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	4,500,000	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	4,500,000	
--	-------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------	--

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	3,000,000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	3,000,000	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	4,000,000	
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	3,570,000	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	3,570,000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	28 Unit	905,030,000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	28 Unit	905,030,000	
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>25%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>25%</b>	<b>20,000,000</b>	
			<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah</b>					<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah</b>			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Persentase terselenggaranya statistik sektoral	25%	20,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Kalabibirang, Kec. Pattallassang	Persentase terselenggaranya statistik sektoral	25%	20,000,000	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 Orang	10,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 Orang	10,000,000	
--	------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------	------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------	------------	--

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persen	5,000,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persen	5,000,000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	5,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	5,000,000	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Tingkat keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>29%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Tingkat keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>29%</b>	<b>10,000,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase pengamanan informasi pemerintah</b>	<b>29%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang</b>	<b>Persentase pengamanan informasi pemerintah</b>	<b>29%</b>	<b>10,000,000</b>	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	5,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Perangkat Daerah	5,000,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Perangkat Daerah	5,000,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagaibagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, assosiasi-assosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program / kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Rencana Kerja Tahun 2026.

**Tabel II-7**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**Kabupaten Takalar**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 yang dioperasionalkan oleh perangkat daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 yaitu "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif**". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) PDRB per kapita (juta);
- 3) Kontribusi PDRB Provinsi;
- 4) Tingkat Kemiskinan;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 6) Indeks Rasio Gini;
- 7) Indeks Modal Manusia;
- 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

**Tabel 3.1.**  
**17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat**

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	
5. Pemberantasan kemiskinan.	
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.</li> <li>8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.</li> <li>9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.</li> <li>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.</li> <li>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.</li> <li>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</li> <li>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</li> <li>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</li> <li>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</li> <li>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</li> <li>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</li> </ol>	<p>nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.</li> <li>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</li> <li>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.</li> <li>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</li> <li>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 memuat outcome prioritas, program dan sub kegiatan yang mendukung asta cita.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital”** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 5 sasaran sebagai berikut: Meningkatkan keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah

1. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatkan pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
4. Meningkatkan tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026 berpedoman pada rRancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel III.2**  
**Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian</b>											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,80	2,90	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	0	39	40	60	80	85	90	
		Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks kepuasan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika (Nilai)	75	75	80	85	90	95	100	
		Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,11	2,6	3,0	3,25	3,50	4,00	4,50	
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	48	50	60	70	80	90	100	

		Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Nilai)	69,33	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (%)	80	80	80	85	90	95	100	

**Tabel III.3**  
**Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)
<b>2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian</b>					
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,80	1,70
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	0	80
		Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks kepuasan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika (Nilai)	2,80	3,00
		Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,11	3,0
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	48	60
		Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Nilai)	70,02	72,00
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (%)	80	80

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Daerah. sebagaimana dalam RKP Tahun 2026 disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS); bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026. RKPD ini akan dioperasionalisasikan dalam rencana kerja perangkat daerah.

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

**4.1.1. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menunjang Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita Tahun 2026 **Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1**  
**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan**

Program Prioritas Presiden (Nasional)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)	2.16.02 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1,153,999,990
2. Koperasi Desa Merah Putih	2.16.02 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1,153,999,990
3. Penurunan Stunting	2.16.02 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1,153,999,990
4. Kemiskinan Ekstrem	2.16.02 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1,153,999,990

**4.1.2. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Pembangunan 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Program Prioritas Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta	767,560,000

No	Program Prioritas Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	5,198,375,050
				2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	15,536,250
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.16.03 Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.03.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1,153,999,990
				2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	4,999,910
				2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	135,539,980

#### 4.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas Kabupaten Takalar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.16.03 Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.03.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas	1,153,999,990

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Masyarakat	
				2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	4,999,910
				2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	135,539,980

**4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja**

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 berjumlah 5 (lima) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) sub kegiatan, dengan total pagu Rp10.910.632.594 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.4**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Takalar**

Tujuan/Sasaran	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Tujuan: Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					10.910.632.594,00									109.301.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.770.743.080,00							109.301.800,00		

	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.625.055.680,00							109.301.800,00		
Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	250.394.500,00						-	109.301.800,00		
		[ Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	85	100	100	250.394.500,00	-	-	-	-	-	-	109.301.800,00	-	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	44.369.300,00					1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	109.301.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			0				20	13.210.510,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		9.104.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.624.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		83.197.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.565.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.565.490,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.365.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2.16.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	4.544.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		-	-	-	-	-	-	250.394.500,00	-	-	-	-	-	-	109.301.800,00	-
	2.16.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	2.602.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>				1 Dokumen	539.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		[ Terpenuhi nya layanan penunjang kinerja perangkat daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	85	100	100	250.394.500,00	-	-	-	-	-	-	109.301.800,00	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.668.700,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	.202.000,00	6	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	.919.900,00	5	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	.546.800,00	4	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1	.364.500,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	776.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	588.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			-	-	-	-	-	<b>250.394.500,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>109.301.800,00</b>	-

	2.16.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.506.000,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	886.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		[ Terpenuhiya layanan penunjang kinerja perangkat daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	85	100	100	250.394.500,00	-	-	-	-	-	-	109.301.800,00	-
	2.16.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	76.506.000,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.332.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.360.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60.814.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.080.000,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	91.080.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	18.900.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	18.900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sasaran : Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	-	-			-	1.294.539.880,00						-	<b>0,00</b>	

		-	-	-	-	-	-	1.294.539.880,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1.294.539.880,00	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat															
			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				1 Komunitas	1.153.999.990,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik															
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				1 Permohonan	4.999.910,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik															

			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				1 Media	135.539.980,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sa			<i>Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik</i>													
Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	-	-			-	6.080.121.300,00						-	0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	98.650.000,00				6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>				1 Dokumen	98.650.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.981.471.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	767.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas</i>				1 Dokumen	5.198.375.050,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														

			<i>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah</i>				1 Dokumen	15.536.250,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						83.893.800,00							0,00	
Sasaran : Meningkatnya akurasi dan pemukhtahiran data sektoral yang terpublikasi dalam portal satu data kabupaten	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	83.893.800,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	83.893.800,00				6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk</i>				100 %	26.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.0 1.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i>				100 %	35.795.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.0 1.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				2 Orang	21.459.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>														
								<b>61.793.600,00</b>							<b>0,00</b>	

Sasaran : Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	-	-			-	61.793.600,00					-		0,00		
	2.21.02.2.0 1	Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	61.793.600,00				-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik															
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	26.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.21.02.2.0 1.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah															

			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</i>				38 Perangkat Daerah	35.344.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X	ON URUSAN						3.139.889.514,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.139.889.514,00							0,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.139.889.514,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.138.654.214,00				6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				36 Orang/bulan	3.133.991.314 ,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	4.662.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	580.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	580.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	655.300,00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	655.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>J U M L A H</b>								<b>10.910.632.594,00</b>							<b>109.301.800,00</b>	

KEPALA DINAS,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

